

2009

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009 dapat tersusun.

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja

Segala kekurangan dan kekhilafan sudah pasti akan dijumpai dalam LAKIP ini, dan kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dari semua pihak sehingga ditahun mendatang kami bisa menyajikan LAKIP yang lebih sempurna.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya LAKIP ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Maret 2010
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Tata Usaha Negara

TTD.

SONSON BASAR, SH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Susunan Organisasi	3
C. Sistematika Penyajian	
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	4
A. VISI DAN MISI	4
B. Visi	4
C. Misi	5
D. Tujuan	5
E. Sasaran Strategik	9
F. Penetapan Kinerja Tahun 2009	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2009	12
B. Analisis Capaian Kinerja	12
C. Akuntabilitas Keuangan	14
BAB IV PENUTUP	15
Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan 2009	16
Lampiran 2 : Penetapan Kinerja Tahunan 2009	17
Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama Ditjen Badilmiltun	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena tranparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja.

Lakip dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari satu unit organisasi berdasarkan rencana stratejik dan penetapan kinerja dari satu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2009 didasarkan pada Perolehan Pagu Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2009 sebesar Rp. 18.238.007.000 (Delapan belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 17.561.203.082 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah)

Tugas Pokok dan Fungsi :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. sedang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MAISEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. Jumlah Unit Kerja :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi 5 unit kerja eselon II, 15 unit kerja eselon III dan 46 unit kerja eselon IV. Penyandang jabatan unit eselon I ini baru dilantik pada bulan Juni 2006, sedang penyandang jabatan eselon II pada bulan Juli 2006 dimana selanjutnya penyandang jabatan eselon III baru terisi pada bulan Januari 2007, penyandang jabatan eselon IV dapat terpenuhi pada bulan Agustus 2007. Pada tahun anggaran 2007 staf dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagian besar merupakan pemangku jabatan struktural, sedangkan pegawai non struktural lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang memiliki jabatan struktural.

2. Tugas pokok dan Fungsi :

Dalam surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara.

Sedang mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara

dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- d. Pemberian teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

B. Susunan Organisasi

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

C. Sistematika Penyajian :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Bab III Kebijakan Bidang Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Bab IV Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

G. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai Rencana Strategis 2007-2009 yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui penetapan kinerja selama 3 tahun berturut-turut.

H. Visi :

Visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan merupakan sebagian dari visi Mahkamah Agung RI, hal ini dikatakan demikian karena sebagai supporting unit dari Sekretaris Mahkamah Agung visinya harus mensupport dari visi yang ada di Mahkamah Agung dan dapat diuraikan sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang professional, melalui system administrasi Peradilan yang (akuntabel) Tertib dan Tranparan”

Dari pernyataan visi diatas terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung RI dimasa yang akan datang yaitu :

- **Kata kunci pertama yaitu : Profesional**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

- **Kata kunci kedua yaitu : Tertib**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terlaksana pelayanan administrasi yang tertib dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, didasarkan pada suatu mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan pelayanan administrasi untuk Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Militer danTata Usaha Negara.

- **Kata kunci ketiga yaitu : Transparan**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan administrasi Peradilan yang terbuka dan akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat pelayanan pada publik atau pencari keadilan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya para pencari keadilan.

Visi tersebut akan dicapai melalui misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Secara umum misi dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai atau mewujudkan visi yang ada.

I. Misi

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan yang professional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Terwujudnya suatu pelayanan yang profesional dari Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
3. Terselenggaranya penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara secara efektif dan efisien.
4. Terwujudnya suatu pelayanan yang transparan dari pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

J. TUJUAN

Tujuan strategik yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi misi seperti disebutkan diatas selama 3 tahun berturut-turut adalah :

1. Program Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis dan Orientasi Wawasan Kepemimpinan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui bimbingan teknis maupun orientasi wawasan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan ketrampilan tenaga teknis dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

dalam bidang administrasi peradilan, sehingga dengan adanya tenaga teknis Peradilan Militer dan tata Usaha Negara yang trampil maka akan berdampak pada cepatnya penyelesaian perkara yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Promosi dan Mutasi :

Promosi dan mutasi bagi teknis dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun tanggapan, kegiatan ini diperlukan untuk menghindari kejenuhan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatannya di satu daerah.

3. Program Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan kembali dan Grasi Pidana Militer

Program ini diselenggarakan melalui kegiatan Pembinaan penelaahan Berkas perkara yang ada di Mahkamah Agung, maupun pelaksanaan bimbingan teknis penelaahan berkas perkara untuk lingkungan Peradilan Militer.

4. Program Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi .Peninjauan kembali Tata Usaha Negara dan Sengketa Pajak.

Program ini diselenggarakan melalui kegiatan Pembinaan penelaahan Berkas perkara yang ada di Mahkamah Agung, maupun pelaksanaan bimbingan teknis penelaahan berkas perkara untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

5. Program peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

a. Kegiatan Pendalaman tupoksi :

Kegiatan pendalaman tupoksi Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer sangat diperlukan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara , sehingga pendalaman tupoksi masing-masing Sumber Daya Manusia yang ada harus ada dan dapat mendukung kinerja yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

b. Kegiatan Peningkatan Disiplin.

Peningkatan disiplin merupakan kegiatan yang utama bagi Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sebagai unit yang baru penerapan disiplin dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui daftar absensi maupun hasil kerja dari masing-masing sumber daya manusia yang ada di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

c. Kegiatan Pembinaan administrasi keuangan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan dalam pembuatan rencana dan program dari setiap unit kerja yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

6. Program Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

a. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang diperlukan sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

b. Kegiatan pengadaan sarana perumahan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan penyewaan rumah tinggal maupun pengadaan tanah bagi sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

c. Kegiatan Pemanfaatan teknologi Informatika.

Guna mendukung Kinerja Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pemanfaatan sarana dan prasarana informatika dilaksanakan seefektif mungkin, walaupun Sumber Daya Manusia yang ada masih sangat terbatas kemampuannya, namun kegiatan ini tetap dilaksanakan guna mendukung kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Keenam Program sebagaimana disebutkan diatas akan dicapai melalui Penyesuaian Program yang secara nasional tertuang dalam DIPA tahun 2008 yakni :

1. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik (dengan beberapa indicator kegiatannya)
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum (dengan beberapa indicator kegiatannya)

Dari kedua program yang ada dalam DIPA tahun 2009 berikut indikatornya maka dapat dituangkan 4 program utama yang dapat mendukung Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

Indikator kinerja dari keempat Program tersebut berikut target yang hendak dicapai pada tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2009	Penanggung jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi • Prosentase Orientasi Pembinaan tenaga teknis • Prosentase Monitoring dan Evaluasi • Prosentase Pengadaan buku register 	80 80 80 100	Dit Ganis Mil dan Dit Ganis Tun

2. Program Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2009	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Perkara Militer yang ditelaah • Prosentase Perkara TUN yang ditelaah • Prosentase Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Militer • Prosentase Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 	100% 100% 20% 20%	Dit. Pratalak Pidana Militer Dit. Pratalak TUN Dit. Ganis Militer Dit. Ganis TUN

3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia di Ditjen Badilmiltun.

No	Tujuan		Target 2009	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan administrasi keuangan 	100	Sesditjen
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Peningkatan kedisiplinan Pegawai 	100	Sesditjen
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penggunaan sarana Teknologi Informatika 	100	Sesditjen

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :

No	Tujuan		Target 2009	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pembelian Tanah 	1 lokasi	Sesditjen
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penyewaan gedung 	1 lokasi	Sesditjen

E. SASARAN STRATEJIK

Sasaran stratejik yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan stratejik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara :

Sasaran	Indikator Kinerja
Terselenggaranya Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Promosi dan Mutasi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. • Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi • Pelaksanaan Pengadaan Buku Register

2. Program Peningkatan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

Sasaran	Indikator Kinerja
Terselenggaranya Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi, PK dan Grasi Pidana Militer. • Pelaksanaan Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi, PK Tata Usaha Negara dan Sengketa Pajak.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator Kinerja
Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tertib • Pelaksanaan Peningkatan Disiplin kerja Pegawai • Pelaksanaan Penggunaan Sarana Teknologi Informatika dalam pelaksanaan tugas

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Sasaran	Indikator Kinerja
Terselenggaranya Peningkatan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembelian Tanah untuk kepentingan SDM di Ditjen Badilmiltun • Pelaksanaan penyewaan Gedung untuk SDM di Ditjenadilmiltun.

F. Penetapan Kinerja Tahun 2009 :

Penetapan Kinerja dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan dari Penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Pemberian tugas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada unit kerja dibawahnya dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan kebawahan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan dalam rencana kinerja tahunan dalam **lampiran 1**

Penetapan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai standar akuntabilitas kinerja aparatur Negara (Sumber Daya Manusia) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu dengan adanya penetapan kinerja, hasil kerja sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan lebih mudah dievaluasi hasil kerjanya dan apabila berhasil meningkatkan kinerjanya akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak baik tentunya bukan reward yang diterima namun punishment.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer tahun 2007 merupakan :

- Pernyataan dari Unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2009 berdasarkan Rencana strategis (Visi dan Misi) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2009 dibuat atas kesepakatan seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hal ini dikatakan demikian karena Penetapan Kinerja yang ada hanya ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran, namun demikian pada saat akan dilakukan penanda tanganan kinerja tahun 2009, seluruh unit kerja yang ada telah memberikan persetujuan dalam rapat pembahasan/peyusunan program/ kegiatan yang ada dan akan diwujudkan pada tahun anggaran 2008.

Dalam Surat keputusan Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tanggal No. selaku kuasa pengguna anggaran dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tanggal 02 Januari 2009 No.Kep/02/DJMT.1/I./2009 yang mendelegasikan kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran maka penetapan kinerja tahun 2009 dapat diuraikan seperti terlampir dalam **lampiran 2**

Program utama tahun 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2009 dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti pada **lampiran 3**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2009

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2009 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terinci dalam **lampiran yang ada dalam LAKIP ini.**

Tingkat capaian dari beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sangat bervariasi, ada sasaran strategis yang belum berhasil secara optimal, untuk mengatasi hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan melakukan analisa dan evaluasi, hal ini dilakukan agar pada tahun mendatang terdapat peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, Program sebagaimana disebutkan diatas akan dicapai melalui Program utama sehingga seluruh program yang secara nasional tertuang dalam DIPA tahun 2008 akan dapat tercapai.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase keberhasilan terhadap program-program yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Program Peningkatan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Promosi dan Mutasi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 	80%	60%	75%

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 	80%	80%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 	80%	100%	125%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengadaan Buku Register 	100%	100%	100%

2. Program Peningkatan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Negara :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi, PK dan Grasi Pidana Militer. 	100%	100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi, PK Tata Usaha Negara dan Sengketa Pajak. 	100%	100%	100%

3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia di Ditjenbadilmiltun :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tertib 	100%	100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Peningkatan Disiplin kerja Pegawai 	100%	100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penggunaan Sarana Teknologi Informatika dalam pelaksanaan tugas 	100%	100%	100%

4. Program Peningkatan sarana dan Prasarana :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembelian Tanah untuk kepentingan SDM di Ditjen Badilmiltun 	1 lokasi	1 lokasi	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyewaan Gedung untuk SDM di Ditjenadilmiltun. 	2 lokasi	2 lokasi	100%

C. Akuntabilitas Keuangan :

Dalam DIPA tahun anggaran 2009, Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2009 sebesar Rp. 18.238.654.000,- (Delapan belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 17.584.977.082,- (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)

bahwa anggaran yang ada dalam DIPA sebagian merupakan anggaran untuk Peningkatan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	U N I T	PAGU	REALISASI	SALDO	%
1	Sekretariat Ditjen	16.168.931.000	15.886.436.472	282.494.528	98,25
2	Dit Binganis & Adm Dilmil	421.280.000	125.660.700	295.619.300	29,83
3	Dit Binganis & Adm TUN	782.853.000	733.354.910	49.498.090	93,68
4	Dit Pratalak Pidmil	362.200.000	350.150.000	12.050.000	96,67
5	Dit Pratalak TUN	503.390.000	489.375.000	14.015.000	97,22
	Jumlah	18.238.654.000	17.584.977.082	653.676.918	

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dapat terukur dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja berbagai program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Segala upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung RI, namun demikian pelaksanaan program-program yang ada tetap mengutamakan prinsip transparansi sehingga dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada public.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara koleqial dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang ada, namun prinsip koleqial dilaksanakan sangat temporary atau sangat tergantung pada jenis kegiatannya, sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak maka prinsip koleqial akan diterapkan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Laporan Akuntabilitas Instansi/ Pemerintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pemberi amanah/pimpinan maupun kepada Publik dan semoga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.